

ABSTRAK

OPTIMALISASI KINERJA ANGGOTA DPRD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024)

Oleh

Anisyah Putri Paramitha

Kinerja DPRD sangat ditentukan dengan kemampuan mereka menghasilkan atau membuat produk hukum, karena sesuai dengan tugasnya di bidang legislasi maka DPRD Provinsi Lampung dituntut untuk dapat menghasilkan Perda terbaru di Provinsi Lampung, namun dari pelaksanaan pembentukannya DPRD Provinsi Lampung belum mampu mencapai target minimal 22 Perda baru setiap tahun. Adapun tujuan penelitian ini adalah Optimalisasi Kinerja Anggota DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian *Pertama*, indikator kemampuan (*Ability*), DPRD Provinsi Lampung dalam hal ini Bapemperda belum melaksanakan tugasnya dalam membentuk Peraturan Daerah dengan baik, karena berdasarkan visi misi target DPRD Provinsi Lampung target terciptanya Perda baru minimal 22 per tahun. Namun berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 6/DPRD.LPG/III.01/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021 saja hanya menghasilkan 12 usulan Raperda dan hanya 11 Raperda yang menjadi Perda, sehingga target capaian minimal DPRD Provinsi Lampung untuk setiap tahunnya belum mampu maksimal tercapai dengan baik. *Kedua*, indikator motivasi (*Motivation*), dimana motivasi para anggota Bapemperda Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membentuk Peraturan Daerah di Provinsi Lampung masih begitu rendah, karena anggota DPRD Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya membentuk Perda baru hanya cenderung bersifat formalistik atau hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja sebagai seorang legislator, hal ini dapat dilihat dari kinerja capaian target DPRD Provinsi Lampung yang belum mampu memenuhi target 22 Perda baru setiap tahunnya, serta tidak adanya pemberian sanksi khusus/tegas secara kelembagaan kepada anggota DPRD yang tidak mengikuti rapat pembentukan Perda.

Kata kunci : Optimalisasi, Kinerja, Fungsi Legislasi.

ABSTRACT

PERFORMANCE OPTIMIZATION OF DPRD MEMBERS IN IMPLEMENTING THE LEGISLATION FUNCTION (Study at the Lampung Provincial DPRD Priode 2019-2024)

By

Anisyah Putri Paramitha

The performance of the DPRD is largely determined by their ability to produce or make legal products, because in accordance with their duties in the field of legislation, the Lampung Provincial DPRD is demanded to be able to produce the latest Regional Regulations in Lampung Province, but from the implementation of its formation the Lampung Provincial DPRD has not been able to achieve the target of at least 22 New Regional Regulations every year. The purpose of this research is to optimize the performance of DPRD members in carrying out the legislative function (study at the Lampung Provincial DPRD for the 2019-2024 period). This research uses descriptive qualitative research with data collection techniques including interviews, observation and documentation. As for the results of the first study, the ability indicator (Ability, Lampung Provincial DPRD in this case Bapemperda has not carried out its duties in forming regional regulations well, because based on the vision and mission of the Lampung Provincial DPRD the target for the creation of a new Perda is at least 22 per year. However, based on the decision of the House of Representatives Lampung Province Region Number 6/DPRD.LPG/III.01/2021 concerning the Program for the Formation of Lampung Provincial Regulations in 2021 only produced 12 proposals for Raperda and only 11 Raperda became Regional Regulations, so that the minimum achievement target of the Lampung Provincial DPRD for each year has not been met. Second, the motivation indicator (Motivation), where the motivation of the members of the Lampung Provincial Bapemperda in carrying out their duties and functions in forming Regional Regulations in Lampung Province is still very low, because Lampung Provincial DPRD members in carrying out their duties to form a new Regional Regulation only tend to be formalistic or just carrying out his obligations as a legislator, this can be seen from the performance of the Lampung Provincial DPRD's target achievement which has not been able to meet the target of 22 new regional regulations every year, and the absence of special/firm institutional sanctions to DPRD members who do not attend the meeting. formation of Regional Regulation

Keywords: Optimization, Performance, Legislation Function.